



PERAN BELANJA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG

KARINA RAHMI MAULIDYA



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Peran Belanja Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2024

Karina Rahmi Maulidya
NIM H1501202025

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RINGKASAN

KARINA RAHMI MAULIDYA. Peran Belanja Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Dibimbing oleh TONY IRRAWAN dan SYAMSUL HIDAYAT PASARIBU.

United Nations Development Program (UNDP) menyatakan pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, namun memiliki cakupan yang lebih luas yakni terkait dengan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dari sisi kualitas kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1990, UNDP mengeluarkan gagasan dalam bentuk *Human Development Index* untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia yang kemudian dipublikasikan secara berkala dalam laporan *Human Development Report (HDR)* secara tahunan.

Ketimpangan seringkali tercermin dalam perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan dalam IPM dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan, karena kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Wilayah perkotaan cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, karena akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Kelompok-kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi juga cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Provinsi Lampung apabila dilihat secara spasial, memiliki dua kota dengan nilai IPM yang lebih besar dari IPM provinsi dan nasional, serta gap yang cukup tinggi antara kota dan kabupaten.

Penerapan kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah dan pengelolaan keuangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fidella (2021) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Rendahnya nilai IPM di Provinsi Lampung serta ketimpangan antara kabupaten/kota menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis efisiensi belanja pemerintah daerah dalam fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap masing-masing indeks pembentuk IPM di Provinsi Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efisiensi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi terhadap masing-masing komponen Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *Stochastic Frontier Analysis (SFA)*. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing berpengaruh signifikan positif pada indeks pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, analisis SFA menunjukkan bahwa penggunaan belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kab/kota di Provinsi Lampung telah efisien.

Kata kunci: ipm, pengeluaran pemerintah, sfa

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

SUMMARY

KARINA RAHMI MAULIDYA. *The Impact of Government Expenditure in Addressing Human Development Inequality in Lampung Province*. Supervised by TONY IRAWAN and SYAMSUL HIDAYAT PASARIBU.

The United Nations Development Program (UNDP) states that development is not only about economic growth and per capita income, but it also has a broader scope related to improving the quality of life and enhancing community welfare through improvements in health and education quality. In 1990, UNDP introduced the concept of the Human Development Index (HDI) to measure the success of a region in its efforts to improve human quality of life, which is then published annually in the Human Development Report (HDR).

Inequality is often reflected in the differences in HDI values between groups within society. Disparities in HDI can reinforce cycles of poverty and inequality, as marginalized groups have limited access to resources and opportunities to improve their quality of life. Urban areas tend to have higher HDI values compared to rural areas due to better access to education, healthcare services, and economic opportunities. Higher-income groups also tend to have higher HDI values compared to lower-income groups. Lampung Province has two cities with HDI values greater than the provincial and national averages, and there is a significant gap between cities and regencies.

Implementing fiscal policies through government spending and financial management is one of the government's efforts to address development inequalities. Research by Fidella (2021) states that government expenditures in the education, health, and economic sectors have a significant impact on HDI. The low HDI values in Lampung Province and the disparities between regencies/cities are the basis for this study to analyze the efficiency of regional government spending in the education, health, and economic functions on each HDI component in Lampung Province.

The aim of this study is to analyze the efficiency of local government spending in the education, health, and economic functions on each component of the Human Development Index in Lampung Province using the Stochastic Frontier Analysis (SFA) method. The results of the panel data regression analysis show that spending on education, health, and economic functions has a significant positive effect on the education, health, and economic indices, respectively. Additionally, the SFA analysis indicates that the use of spending on education, health, and economic functions by regencies/cities in Lampung Province has been efficient.

Keywords: human development index, government expenditure, sfa



@Hak cipta milik IPB University

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2024 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERAN BELANJA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG

KARINA RAHMI MAULIDYA

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada
Program Studi Ilmu Ekonomi

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis:

1. Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc.Agr
2. Dr. Widyastutik, SE, M.Si

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Judul Tesis : Peran Belanja Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung
Nama : Karina Rahmi Maulidya
NIM : H1501202025

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Disetujui oleh

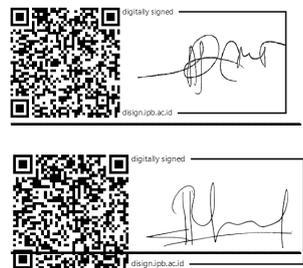
Pembimbing 1:
Dr. Tony Irawan, SE, M.App.Ec



Pembimbing 2:
Dr. Syamsul Hidayat Pasaribu, SE, M.Si

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr Ir Sri Mulatsih MScAgr
NIP. 196405291989032001



Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Manajemen :
Dr Irfan Syauqi Beik SP MScEc
NIP. 197904222006041002

Tanggal Ujian: 17 Juli 2024

Tanggal Pengesahan:

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah subhannahu wa ta'ala atas segala nikmat-Nya serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penelitian ini berjudul Peran Belanja Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

Penelitian ini dapat penulis selesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada komisi pembimbing Bapak Dr. Tony Irawan, S.E, M.App.Ec dan Bapak Dr. Syamsul Hidayat Pasaribu, S.E, M.Si atas bimbingan dan arahnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc.Agr dan Dr. Widyastutik, SE., M.Si selaku penguji pada ujian tesis penelitian. Terima kasih atas masukan untuk kesempurnaan penelitian tesis ini.
2. Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc.Agr, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, serta Regi Danuwijaya, AMd dan Yuhandini, SE atas dukungan dan bantuan selama penulis menjalankan perkuliahan.
3. Rekan-rekan penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
4. Orang tua penulis Bapak Nanang Nursiswandi dan Ibu Sri Ekaningsih atas segala doa dan restu untuk penulis. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juli 2024

Karina Rahmi Maulidya

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	4
Tujuan Penelitian	7
Manfaat Penelitian	7
Ruang Lingkup Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
Efisiensi	8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
Indeks Pembangunan Manusia	14
Penelitian Terdahulu	16
Kerangka Pemikiran	19
Hipotesis Penelitian	20
III. METODE PENELITIAN	21
Jenis dan sumber data penelitian	21
Metode Analisis	21
Model Penelitian Stochastic Frontier Analysis (SFA):	27
Definisi Operasional Variabel	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
Belanja Pemerintah Daerah dengan Indeks Pembentuk IPM	29
Belanja Fungsi Pendidikan	29
Belanja Fungsi Kesehatan	32
Belanja Fungsi Ekonomi	34
Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pendidikan	35
Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Kesehatan	38
Pengaruh Sektor Ekonomi terhadap Indeks Ekonomi	43
V. KESIMPULAN DAN SARAN	47
Kesimpulan	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

1. Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia	1
2. Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera tahun 2018-2022	4
3. IPM Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2022	5
4. Perhitungan indeks komponen IPM	15
5. Jenis dan sumber data penelitian	21
6. Keterangan variabel dan satuan	27
7. Belanja fungsi pendidikan tahun 2014-2018 Kab/Kota di Provinsi Lampung (miliar rupiah)	30
8. Persentase penggunaan belanja pegawai pada belanja fungsi Pendidikan tahun 2018 dan tahun 2022 (%)	31
9. Hasil regresi SFA pada sektor pendidikan	35
10. Koefisien efisiensi SFA pada sektor pendidikan	37
11. Persentase Desa Menurut Jarak ke Fasilitas Pendidikan di Kab/Kota Provinsi Lampung tahun 2021	38
12. Hasil regresi SFA pada sektor kesehatan	38
13. Koefisien efisiensi SFA pada sektor kesehatan	39
14. Indikator morbiditas Provinsi Lampung tahun 2020-2022	40
15. Indikator morbiditas Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2022	40
16. Hasil regresi SFA pada sektor ekonomi	43
17. Koefisien efisiensi SFA pada sektor ekonomi	44
18. Tingkat kemantapan jalan di Provinsi Lampung tahun 2023	46

DAFTAR GAMBAR

1. IPM kab/kota Provinsi Lampung tahun 2022	2
2. Alokasi belanja Kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2022	6
3. Alokasi belanja pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2022	6
4. Alokasi belanja ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2022	7
5. Model Produksi Frontier	10
6. Kerangka pemikiran	20
7. Kuadran Tipologi Klassen	22
8. Belanja pendidikan dan indeks pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2014	29
9. Belanja pendidikan dan indeks pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018	29
10. Belanja pendidikan dan indeks pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2022	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR GAMBAR (lanjutan)

11. Belanja fungsi kesehatan dan indeks kesehatan Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2014	32
12. Belanja fungsi kesehatan dan indeks kesehatan kab/kota di Provinsi Lampung tahun 2018	32
13. Belanja fungsi kesehatan dan indeks kesehatan kabupaten/kota di Lampung tahun 2022	33
14. Belanja fungsi ekonomi dan indeks ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2014	34
15. Belanja fungsi ekonomi dan indeks ekonomi kab/kota di Provinsi Lampung tahun 2018	34
16. Belanja fungsi ekonomi dan indeks ekonomi kab/kota di Provinsi Lampung tahun 2022	35
17. Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas yang Usia Kawin Pertama dibawah 16 Tahun Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2022	41
18. Persentase penolong kelahiran terakhir yang ditangani non tenaga medis menurut kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2022	42
19. Persentase desa yang sulit menjangkau puskesmas dan rumah sakit menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung (Persen) tahun 2021	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Realisasi belanja pendidikan kab/kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2022 (miliar rupiah)	52
2. Lampiran 2 Realisasi belanja kesehatan kab/kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2022 (miliar rupiah)	54
3. Lampiran 3 Realisasi belanja ekonomi kab/kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2022 (miliar rupiah)	56
4. Lampiran 4 Hasil Efisiensi Sektor Pendidikan.....	58
5. Lampiran 5 Hasil efisiensi sektor kesehatan	60
6. Lampiran 6 Hasil efisiensi sektor ekonomi	62
7. Lampiran 7 Hasil uji maximum likelihood sektor pendidikan.....	64
8. Lampiran 8 Hasil uji maximum likelihood sektor kesehatan.....	65
9. Lampiran 9 Hasil uji maximum likelihood sektor ekonomi.....	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.